

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Hasil Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
1. Teori Kebebasan Berpendapat	14
2. Teori Kebijakan Publik	19
3. Teori Hierarki Hukum.....	20
4. Teori Hurriyyah	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	27
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukan peraturan Pembentukan Perundang-undangan.....	27
2. Teori dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	29
3. Konsep dan Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	33
4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik	38

B. Interpretasi Hukum.....	41
1. Pengertian Interpretasi Hukum	41
2. Metode Interpretasi Hukum	43
C. Teori Siyasah Dusturiyah Tentang Kebebasan Berpendapat	45
1. Jaminan Atas Hak-Hak Asasi Manusia (<i>Al-Hurriyyah</i>)	51
2. Persamaan Kedudukan Semua Orang di Mata Hukum (<i>Al-Musawat</i>) ...	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Metode Penelitian.....	54
B. Jenis Data	55
C. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	56
F. Sistematika Penulisan	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia Dalam Mengatur Dan Menjamin Kebebasan Berpendapat	58
B. Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Kebijakan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	68
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	93
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	109



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG